

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Untuk saat ini Pemda Kabupaten Klaten belum memiliki produk khusus untuk melaksanakan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin di Kabupaten Klaten, Sehingga Pemda dalam melaksanakan tanggung jawabnya masih menggunakan program dari pusat yang kemudian di maksimalkan oleh pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait supaya dapat menekan angka kemiskinan di Kabupaten Klaten. Selain itu pemerintah juga melibatkan pihak-pihak swasta untuk ikut serta dalam menekan angka kemiskinan karena keterbatasan anggaran dan banyaknya angka kemiskinan yang harus dipenuhi hak konstitusionalnya oleh Pemda Kabupaten Klaten. Di Kabupaten Klaten sendiri membagi programnya menjadi 3 antara lain :
 - a. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan ;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat ;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Melalui pengelompokan-pengelompokan diatas, harapannya adalah supaya kedepan angka kemiskinan khususnya diwilayah kabupaten Klaten dapat ditekan terus dan angka kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan.

2. Angka prosentase kemiskinan di wilayah Kabupaten Klaten setiap tahun dapat ditekan. Dengan adanya program bantuan pengentasan kemiskinan ini harapannya masyarakat kurang mampu yang berada di wilayah Kabupaten Klaten ini dapat terpenuhi hak-haknya dan kedepan mereka dapat memperbaiki kualitas hidupnya sehingga taraf hidupnya dapat terus meningkat dan masyarakat kurang mampu dapat menjadi mandiri dan sejahtera hidupnya. Rumah keluarga fakir miskin di Kabupaten Klaten yang tidak layak huni kini telah menjadi layak huni berkat adanya RTLH. Kebutuhan pangan fakir miskin di Kabupaten Klaten terbantu dengan adanya BPNT. Kemudian kebutuhan masyarakat yang berada dibawah angka kemiskinan dapat terbantu dengan adanya PKH. Angka putus sekolah semakin berkurang dengan adanya PIP-KIP. Jaminan kesehatan masyarakat dapat terbantu dengan adanya JKN-KIS. Pola hidup masyarakat semakin membaik dengan adanya program PHBS. Selain program bantuan berbasis bantuan dan perlindungan, program bantuan berbasis pemberdayaan masyarakat dan umkm dapat menjadikan warga masyarakat menjadi mandiri dan dapat menurunkan angka pengangguran di wilayah Kabupaten Klaten.

B. SARAN

1. Kemiskinan merupakan permasalahan *multisectoral* sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini memerlukan kerjasama berbagai pihak supaya dapat terkoordinasi

dan dapat mempercepat penekanan angka kemiskinan. Selain itu Pemda sesegera mungkin membuat produk program pengentasan fakir miskin dan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin sendiri. Kemudian diikuti dengan pembuatan dan penerbitan Perda yang mengatur tentang program pengentasan fakir miskin dan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin, karena hingga saat ini di Pemda Kabupaten Klaten belum ada perda yang mengatur tentang pemenuhan hak dan penanggulangan kemiskinan itu sendiri.

2. Dengan membuat produk pengentasan fakir miskin dan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin sendiri dan kemudian diikuti pembuatan dan penerbitan Perda yang mengatur tentang pengentasan fakir miskin dan pemenuhan hak konstitusional fakir miskin. Angka kemiskinan dapat ditekan dengan cepat karena program pemerintah pusat, swasta, dan daerah dapat saling bekerja sama sehingga hal ini akan dapat mempercepat kerja Pemda dalam menekan angka kemiskinan dan memenuhi hak-hak konstitusional fakir miskin yang berada di wilayah Kabupaten Klaten.